



SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PROGRAM KAMPUNG TEMATIK KULINER DI KELURAHAN JATINGALEH KOTA SEMARANG

Sekar Mutiara Mashita, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang Kontak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Culinary Thematic Village Program, shows that there is no involvement of the private sector, lack participation of younger generation, and parents domination in the community. This study aims to describe and analyze stakeholder synergy and the inhibiting factors, in the implementation of the Culinary Thematic Village Program in Jatingaleh Village, Semarang City. The research method used is descriptive qualitative. The results show that stakeholder synergy hasn't gone well. The society are less active in providing feedback, and coordination isn't effective. Factors inhibiting stakeholder synergy is, human resources, budget constraints, and role domination in society. The conclusion is, communication hampered by the inactivity society in providing feedback. Coordination hasn't been effective, due to a lack community commitment, competence, and awareness, lack of optimal coordination continuity, and role dominance from RW. The conclusion is, open discussion forums, develop closer interpersonal relationships, hold meetings for all stakeholders, conduct comprehensive and routine education for society, increase promotion, seek funding assistance, and provide opportunities for society according to their respective roles.

Keywords: Stakeholder Synergy, Communication, Coordination.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah, yang memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut merupakan wujud penerapan otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Menurut Sari (2020: 4) pemerintah daerah bertanggung jawab mencapai tujuan otonomi daerah, dengan meningkatkan dasar kemandirian dan inovasi baru pembangunan daerah. Menurut Kagungan

(2021:7) pemerintah pusat melalui Kemendagri mengadakan kompetisi *Innovative Government Awards* sebagai pemacu semangat berinovasi pemerintah daerah untuk mensejahterakan, memajukan pembangunan, dan daya saing daerah.

Salah satu daerah yang sedang gencar meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui penciptaan program inovatif yakni Kota Semarang. Menurut Dian, et.al. (2018: 96) Kota Semarang terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha kecil,

menengah, serta jual beli. Daya tarik perekonomian yang tinggi memunculkan permasalahan mengenai kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah penduduk miskin Kota Semarang tahun 2019-2021 mencapai 84,45 ribu jiwa atau sebesar 4,56%.

Pemerintah Kota Semarang membentuk Perda Kota Semarang No. 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Program kebijakan yang ditetapkan yaitu Program Gerbang Hebat (Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem Bersama Masyarakat) dengan mewujudkan inovasi Program Kampung Tematik, sebagai upaya mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kampung Tematik berupaya mengatasi kemiskinan, pemukiman kumuh, perekonomian, dan perbaikan infrastruktur dengan melibatkan partisipasi masyarakat, melalui optimalisasi penggunaan potensi kawasan kampung. Program ini mulai diterapkan akhir tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Saat ini terdapat 260 Kampung Tematik yang tersebar 177 Kelurahan, dengan menganut tema yang disesuaikan potensi wilayahnya.

Salah satu wujud penerapannya yaitu, Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang, yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, karena melihat banyaknya potensi usaha kuliner di wilayahnya. Menurut Bappeda Kota Semarang tahun 2021 Kampung Tematik Kuliner dijadikan sebagai kampung percontohan, bagi Kelurahan lain yang ingin mengajukan proposal pembentukan Kampung Tematik. Menurut Berliandaldo et al. (2021:222) program ini memerlukan sinergi yang baik antar *stakeholder*, sejalan dengan paradigma *good governance*, yakni mengutamakan keterpaduan diantara *state, private, and society* untuk mendukung keberhasilan program.

Berdasarkan observasi penulis, terdapat permasalahan dimana belum terlihatnya keterlibatan pihak swasta, yang memiliki kelebihan dalam hal finansial dan keterampilan. Pada pelaksanaannya, *stakeholder* yang terlihat paling aktif hanya pihak paguyuban Kampung Tematik Kuliner dan para pelaku usaha. Keterlibatan generasi muda, sebagai pihak yang terampil dalam hal promosi dan *branding* juga masih kurang. Berdasarkan daftar pengurus paguyuban Katalog Kampung Tematik Kuliner (2021:10-31) dari total 25 pengurus, hanya terdapat 2 pengurus dari kalangan generasi muda atau dalam presentase sebesar 8%. Sebanyak 23

pengurusnya adalah kalangan orang tua rentan usia 40-60 tahun dengan presentase sebesar 92%. Adanya dominasi kaum orang tua dan kurangnya partisipasi beberapa *stakeholder* dapat menjadikan program sulit berkembang, Hal tersebut dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan, yang memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan program Kampung Tematik Kuliner di masa depan.

Sinergitas *stakeholder* dibutuhkan untuk membangun kesepakatan, yang mengakomodasi seluruh kepentingan *stakeholder* yang terlibat. Menurut Butar (2020:8) keberhasilan pelaksanaan program harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang sinergis antar *stakeholder* yang terlibat. Sinergi menjadi kunci utama keberhasilan program, karena mencerminkan seberapa jauh individu dapat memadukan peranannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sinergitas *stakeholder* dan faktor penghambat sinergitas *stakeholder*, dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramono dan Kinansih (2019) berjudul, sinergitas *stakeholder* dalam penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota

Surakarta. Bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas antar *stakeholder*, dalam penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berhasil menunjukkan jalinan sinergitas *inside stakeholder* melalui komunikasi dan koordinasi yang cukup baik, tetapi sinergitas *outside stakeholder* masih kurang baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fibrianyas (2020) berjudul sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan kelestarian hutan kawasan UB *Forest*. Bertujuan mengidentifikasi peran *stakeholder*, dalam pengelolaan kelestarian UB *Forest*. Menemukan peran masyarakat sebagai penjaga keberlanjutan fungsi hutan perlu ditingkatkan. Peran PPL sebagai pendamping petani belum optimal. LMDH hanya mengkoordinir warga untuk penyadapan getah pinus. Manajemen UB *Forest* berperan mengembangkan *Master Plan UB Forest*.

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kagungan & Yulianti (2019) berjudul *the synergy among stakeholders to develop Pisang Island as marine tourism: the case of underdeveloped area*. Bertujuan menganalisis sinergi *stakeholder* dalam pengembangan wisata bahari Pulau Pisang. Hasil penelitian menunjukkan strategi

pengembangan wisata, belum memiliki investor yang menanamkan modal, dan masyarakat belum memanfaatkan potensi wilayah dengan optimal.

Perbedaan penelitian kali ini terdapat pada kriteria sinergitas yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas menurut Najiyati & Rahmat (2011: 120-122) yang memuat kriteria komunikasi dan koordinasi. Penulis menambahkan sub kriteria kepercayaan dan kesetaraan menurut Parji (2017:10-11) dalam kriteria komunikasi dan koordinasi. Perbedaan lainnya, penelitian ini berfokus pada analisis sinergitas *stakeholder*, dalam pelaksanaan program Kampung Tematik Kuliner. Lokus penelitian di Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang. Subyek penelitian terdiri dari Bappeda Kota Semarang, Kecamatan dan Kelurahan, Paguyuban Kampung Tematik Kuliner, dan pelaku usaha di Kampung Tematik Kuliner.

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Menurut Muhammad (2019:13) administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan yang secara khusus melakukan kajian terhadap fungsi internal dan eksternal, pada struktur serta proses penting dalam bagian sistem aparatur pemerintahan. Pengertian administrasi

publik berdasarkan Stillman II (dalam Keban, 2014:5-6) sebagai berikut:

1. Menurut Dimock, Dimock, & Fox administrasi publik adalah kegiatan produksi barang atau jasa untuk melayani kepentingan masyarakat. Administrasi publik sebagai aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pelayanan publik.
2. Menurut Nigro & Nigro administrasi publik merupakan kerjasama kelompok dalam lingkup publik mencakup cabang yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga cabang tersebut berperan penting dalam melakukan formulasi kebijakan dan dapat menjadi bagian dari proses politik.
3. Nicholas Hendry menekankan administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik, untuk mengenalkan pemahaman mengenai peran pemerintah dengan masyarakat, dan mendorong agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses pengkoordinasian, pelaksanaan wewenang oleh administrator publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola seluruh keputusan dalam kebijakan publik.

B. Governance dan Good Governance

Governance menurut Sumarto (dalam Lustiadi, 2016:62) *governance* merupakan mekanisme, tata cara, dan praktik pemerintahan, serta masyarakat dalam mengatur sumber daya dan pemecahan masalah publik. *Governance* tindakan menggambarkan perubahan kepemilikan, yang semula milik negara menjadi milik masyarakat negara. Dapat disimpulkan, *governance* adalah rangkaian proses interaksi politik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta maupun pengaruh pemerintahan terhadap kepentingan masyarakat. Menurut Sedarmayanti (dalam Pramono, 2019:301) *governance* memiliki tiga *stakeholder* utama, yakni:

1. State (Negara atau Pemerintahan)

Lembaga pemerintahan memiliki fungsi dalam hal menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif dan teratur.

2. Private Sektor (Sektor Swasta)

Sektor swasta berperan dalam menciptakan suatu pekerjaan dan pendapatan beserta dukungan finansial, untuk menunjang keberhasilan program kebijakan.

3. Society (Masyarakat)

Masyarakat berperan dalam hal membangun dan memperkuat interaksi bidang ekonomi, sosial, dan politik diantara

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Good governance menurut Basuki dan Shofwan (dalam Lustiadi, 2016:59) sebagai upaya untuk mengubah sifat dan kebiasaan pemerintah, yang cenderung mendominasi dengan mengesampingkan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintahan yang lebih aspiratif dalam mengamodasikan aspirasi masyarakat. *Good governance* bertujuan untuk menciptakan *stakeholder* yang bertanggungjawab dan solid. Terciptanya *good governance* dipengaruhi kerjasama yang sinergis antar *stakeholder*. Dapat disimpulkan bahwa, *good governance* merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang baik, untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara transparan dan akuntabel. Melalui pelibatan aktor swasta dan masyarakat, dan menjaga sinergitas dalam interaksi yang dibangun.

C. Stakeholder

Menurut Bryson (dalam Napitupulu, 2020:5) *stakeholder* memiliki beragam definisi, sebagai berikut:

1. *Stakeholder* merupakan seluruh golongan yang akan dipengaruhi dan dapat mempengaruhi suatu strategi organisasi.
2. *Stakeholder* adalah sebuah organisasi yang dapat menuntut perhatian sumber

daya atau output dari grup maupun organisasi lainnya, yang dipengaruhi oleh output organisasi itu sendiri.

3. *Stakeholder* adalah suatu individu atau kelompok kecil yang memiliki kuasa atau peranan dalam hal merespon, bernegosiasi, dan mengubah strategi pada sebuah organisasi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa, *stakeholder* merupakan suatu individu, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, ataupun dipengaruhi oleh suatu strategi yang ada pada sebuah organisasi. Klasifikasi *stakeholder* menurut Mathur (dalam Napitupulu, 2020:5) yakni:

1. *Stakeholder* kunci. Pihak yang berwenang secara legal untuk membuat suatu keputusan baik program maupun kebijakan. *Stakeholder* kunci meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga pelaksana program kebijakan.
2. *Stakeholder* primer. Memiliki kepentingan secara langsung pada suatu program, dan turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Khususnya dalam menyerap aspirasi publik, sekaligus sebagai pelaksana teknis program yang dijalankan.
3. *Stakeholder* sekunder. *Stakeholder* ini tidak berkaitan langsung dengan kepentingan program, tetapi memberikan kepedulian, turut

menyampaikan aspirasi, serta berupaya memberikan pengaruh terhadap keputusan pemerintah secara legal mengenai permasalahan tertentu.

D. Sinergitas

Menurut Covey (dalam Rakamdani, 2019:5) sinergitas adalah hubungan komunikasi tingkat tinggi yang terjalin atas dasar integrasi dan kerjasama yang tinggi, antar individu pada suatu kelompok atau instansi, maupun lembaga sosial masyarakat. Menurut Handoko (2017: 29) sinergitas sebagai hubungan interaksi antar dua bagian atau lebih, yang dapat menghasilkan pengaruh gabungan secara lebih besar, daripada hasil dari pengaruh secara personal. Menurut Junaid (2019:23) sinergitas adalah perpaduan berbagai unsur pemangku kepentingan, untuk menghasilkan sesuatu secara positif.

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Najiyati dan Rahmat (2011: 120-122) sinergitas *stakeholder* diartikan sebagai suatu kombinasi unsur-unsur, serta bagian yang dapat menghasilkan output atau keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Pendapat lain diutarakan oleh Deardorff dan Williams (dalam Handoko, 2017:30) bahwa sinergitas bukan suatu hal yang dapat kita pegang dengan tangan kita sendiri, tetapi melipatgandakan pengaruh, dan memungkinkan energi suatu individu berlipat ganda melalui usaha bersama.

Dapat disimpulkan bahwa, sinergitas merupakan suatu keterpaduan yang terjalin dengan integrasi dan kerjasama, diantara berbagai *stakeholder* yang saling mendukung demi keberhasilan suatu program. Sinergitas terbentuk dari adanya proses interaksi yang dapat menghasilkan keseimbangan, keterpaduan, dan keharmonisan yang mampu mewujudkan sesuatu secara optimal.

E. Sinergitas Stakeholder

Sinergitas *stakeholder* dapat diartikan sebagai bentuk kombinasi atau perpaduan peranan dari berbagai *stakeholder*, baik dari pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam suatu program atau kebijakan. Demi memberikan hasil lebih baik dan maksimal dalam pelaksanaan program. Sinergitas *stakeholder* perlu dilakukan, karena setiap *stakeholder* yang terlibat saling membutuhkan satu sama lain, serta cenderung tidak dapat bekerja sendiri karena adanya kebutuhan dan ketergantungan atas berbagai fungsi dan peranan dari *stakeholder* lain diluar kemampuan pribadi. Pencapaian sinergitas *stakeholder*, dapat dikaji menggunakan kriteria menurut Najiyati dan Rahmat (2011: 120-122) berikut:

1. Komunikasi

Menurut Sofyandi dan Herman (dalam Dwinugraha, 2017:1) komunikasi dapat

dibedakan menjadi dua bagian, yakni komunikasi yang berorientasi pada sumber kegiatan demi memperoleh tanggapan, serta komunikasi yang berorientasi pada penerima, yang melihat komunikasi sebagai seluruh kegiatan dalam menanggapi rangsangan. Menurut pendapat Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5) komunikasi memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. *Numerical* atau jumlah orang yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Jumlah umum kriteria komunikasi biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, tergantung pada situasi dan topik yang dibicarakan.
- b. *Channel* atau media dalam berkomunikasi adalah suatu hal yang dijadikan sebagai sarana, untuk melakukan komunikasi antar pihak. Dapat dilakukan melalui media sosial, komunikasi verbal, non-verbal, lisan, atau tulisan.
- c. *Goal* atau tujuan adalah kriteria komunikasi yang dapat ditunjukkan dengan partisipan memberi perhatian pada suatu isu, permasalahan, dan kepentingan tertentu kepada orang lain.
- d. *Feedback* atau umpan balik merupakan tanggapan yang telah diberikan sebagai sebuah informasi, mengenai apa yang

telah dilakukan, hasil yang dikeluarkan, serta hal yang perlu diperbaiki.

- e. *Relationship Type*. Tipe hubungan komunikasi umumnya bersifat *interpersonal*. Komunikasi yang berjalan sesuai etika yang baik, maka akan terjalin tipe hubungan komunikasi secara profesional.

2. Koordinasi

Menurut Pearce dan Ribson (dalam Silalahi, 2011:217) koordinasi merupakan integrasi berbagai aktivitas individu dan kelompok, dalam satu usaha bersama yang dilakukan untuk meraih tujuan bersama. Menurut Handyaningrat (dalam Aprilianto, 2016: 36-37) koordinasi memiliki kriteria berikut:

- a. Kesepakatan dan komitmen. Berkaitan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya bentuk kesepakatan atau kesesuaian kehendak antar pihak.
- b. Kompetensi, berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, sikap, semangat kerja, dan kompetensi *stakeholder* yang dapat bermanfaat positif bagi pelaksanaan program.
- c. Kesadaran, berkaitan dengan tanggung jawab pelaksana terhadap hasil koordinasi. *Stakeholder* dengan kesadaran tinggi, cenderung selalu

bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

- d. Kontinuitas, berkaitan dengan koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, seiring dengan perubahan di lingkungan.

Konsep sinergitas menurut Parji (2017:10-11) memiliki dua kriteria utama, sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yang menandakan adanya tindakan kesediaan seseorang berdasarkan keyakinan, untuk menggantungkan dirinya pada orang lain yang terlibat dalam pertukaran informasi.
- b. Kesetaraan, merupakan keadaan yang menunjukkan adanya kedudukan yang sama, serta peranan dan fungsi yang tidak lebih tinggi maupun tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan memiliki kriteria tidak adanya dominasi peran antar *stakeholder*, dan tidak adanya subordinasi antar *stakeholder*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif Kualitatif. Situs Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan melalui uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, *reliabilitas*, dan *confirmability* *objektivitas*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang.

1. Komunikasi

Kriteria komunikasi menurut Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5) yakni:

a. *Numerical*

Komunikasi yang dilakukan antar *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner, sudah memenuhi kriteria *numerical* menurut Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5) yang terdiri dari dua orang atau lebih, agar dapat terjalin pertukaran informasi antar pihak secara efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunikasi antar Bappeda Kota Semarang, Kecamatan Candisari, dan Kelurahan Jatingaleh dalam pelaksanaan program. *Stakeholder* Kelurahan juga telah berkomunikasi dengan LPMK Jatingaleh dan Ketua RW 02, sebagai penanggung jawab Program Kampung Tematik Kuliner.

Pihak paguyuban dan pelaku usaha juga sudah saling berkomunikasi. Pada sisi lain, walaupun komunikasi dilakukan secara tidak langsung melalui perantara Ketua RW, namun sudah terdapat komunikasi antara *stakeholder* pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi diantara pihak pemerintah, yakni Bappeda dan Kecamatan dengan masyarakat dilakukan melalui perantara pihak Kelurahan. Komunikasi antar Kelurahan dengan masyarakat juga dilakukan melalui perantara Ketua RW, yang selanjutnya menyampaikan informasi kepada pihak paguyuban dan masyarakat.

b. *Channel*

Komunikasi antar seluruh *stakeholder* telah memenuhi kriteria *channel* menurut Sopyan (2011:29). Media komunikasi antar *stakeholder* Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan dilakukan dengan media sosial melalui *WhatsApp* yang sifatnya *incidental*. Hal tersebut menandakan, komunikasi dilakukan secara lisan dan tulisan yang sifatnya informal, sesuai pendapat Sopyan (2011:29).

Komunikasi antar *stakeholder* Kelurahan dan LPMK dengan Ketua RW 02 atau pengurus paguyuban, dilakukan dengan cara bertatap muka langsung. Komunikasi tersebut dilakukan hanya saat terdapat pertemuan LPMK, sehingga

komunikasi dilakukan secara lisan dan bersifat formal. Komunikasi antar pihak Kelurahan, LPMK, dan Ketua RW 02 menjadi kurang intensif, disebabkan karena komunikasi dilakukan hanya pada waktu tertentu. Komunikasi antar Ketua RW 02 dan pengurus paguyuban dengan pelaku usaha dilakukan baik melalui media sosial *WhatsApp* grup paguyuban dan tatap muka langsung saat rapat paguyuban, maupun saat kegiatan dilaksanakan.

c. Goal

Komunikasi antar seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner, telah memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan pendapat Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5). Komunikasi antar Bappeda, Kecamatan dan Kelurahan memiliki tujuan yang jelas untuk mengetahui perkembangan dan evaluasi program.

Tujuan komunikasi antara *stakeholder* Kelurahan dengan pihak paguyuban beserta pelaku usaha, yaitu untuk melakukan upaya-upaya peningkatan program seperti pemasaran melalui media *online*. Hal tersebut sejalan dengan tujuan LPMK selama berkomunikasi dengan Ketua RW 02, yakni untuk membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui sosialisasi atau pelatihan, sekaligus membantu mempromosikan produk.

Komunikasi antar pengurus paguyuban dan pelaku usaha juga telah memiliki tujuan yang jelas, dengan adanya kepentingan dan permasalahan yang dibahas. Berkaitan dengan upaya peningkatan pelaksanaan, pemberian kesempatan anggota untuk menyampaikan kreativitas atau ide-ide yang bermanfaat bagi pelaksanaan program, serta membahas solusi yang dapat dilakukan mengenai penjualan yang sedang lesu, hingga penurunan partisipasi pelaku usaha dalam Program Kampung Tematik Kuliner.

Pada proses komunikasi, selain dibutuhkan tujuan yang jelas, juga diperlukan kepercayaan diantara seluruh *stakeholder*. Sudah terbentuk rasa saling percaya diantara seluruh *stakeholder*. Seluruh *stakeholder* juga telah mempercayakan informasi yang dimilikinya, untuk dibagikan kepada *stakeholder* lainnya. Mulai dari *stakeholder* pemerintah yakni Bappeda, Kecamatan, Kelurahan, LPMK, pengurus paguyuban, serta masyarakat sebagai pelaku usaha. Kepercayaan didorong adanya keyakinan akan integritas, konsistensi, dan kemampuan yang dimiliki setiap *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner, baik antar pemerintah, LPMK, paguyuban, dan masyarakat.

d. Feedback

Komunikasi antar *stakeholder* Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan sudah terjalin secara dua arah, sesuai dengan pendapat Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan saling memberi *feedback* atau tanggapan pada saat berkomunikasi, melalui *WhatsApp*. Komunikasi antar Kelurahan dengan Ketua RW 02, juga sudah terjalin secara dua arah. Kelurahan telah memberikan kesempatan Ketua RW 02 untuk memberi tanggapan, menyampaikan inovasi maupun koreksi yang membangun saat rapat LPMK. Serupa dengan komunikasi antar Ketua RW 02, dengan paguyuban dan para pelaku usaha, yang sudah terjalin secara dua arah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberian *feedback* dari paguyuban dan pelaku usaha, dengan cara diskusi untuk menggali ide pengembangan program.

Kualitas *feedback* yang diberikan antar seluruh *stakeholder*, sudah jelas, membangun, dan bermanfaat bagi pelaksanaan program. Sesuai pendapat Armstrong (dalam Sari, 2020:47) bahwa *feedback* dikatakan positif apabila seseorang melakukan sesuatu dengan baik, dan bersifat konstruktif apabila mampu memberi saran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. *Feedback* yang diberikan antar Bappeda, Kelurahan, dan Kecamatan

sudah bermanfaat khususnya untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program. Komunikasi antar LPMK dan Ketua RW 02 sudah bermanfaat positif dan bersifat konstruktif, khususnya untuk peningkatan kemampuan pelaku usaha terhadap mutu produk. Kualitas *feedback* yang diberikan antar paguyuban dan pelaku usaha, mayoritas bermanfaat dan membangun. Melalui adanya gagasan yang disampaikan pihak paguyuban maupun pelaku usaha, terutama dalam hal peningkatan daya jual.

Pada sisi lain, tingkat keaktifan pelaku usaha dalam memberikan *feedback*, pada proses komunikasi dengan pihak paguyuban masih kurang. Banyak pelaku usaha yang hanya bergantung pada pendapat pihak lain, akibat kurangnya keberanian dalam penyampaian pendapat, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga intensitas *feedback* yang diberikan menjadi kurang maksimal, walaupun kualitas *feedback* sudah efektif dan bermanfaat.

Keaktifan *stakeholder* pemerintah yakni Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan dalam memberikan *feedback* dapat dikatakan sudah saling aktif, tetapi hanya pada kondisi tertentu. Seperti saat Bappeda dan Kecamatan melakukan pemantauan pelaksanaan program, walaupun hanya melalui media sosial, tetapi kedua pihak

sudah saling aktif memberikan respon. Kelurahan cukup aktif memberikan informasi kepada Kecamatan terkait perkembangan program.

e. Relationship Type

Tipe hubungan komunikasi seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner, telah terjalin secara *interpersonal* dengan hubungan kerja yang profesional. Hal tersebut membuktikan telah terpenuhinya kriteria *relationship type*, bahwa komunikasi yang berjalan sesuai etika, akan terjalin hubungan kerja secara profesional. Hubungan komunikasi yang profesional antar *stakeholder*, dibuktikan dengan tujuan komunikasi yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kampung Tematik Kuliner. Hal tersebut membuktikan telah terpenuhinya kriteria *relationship type* menurut Littlejohn & Foss (dalam Mukarom, 2021:4-5) bahwa komunikasi yang berjalan sesuai etika, akan terjalin hubungan kerja secara profesional.

2. Koordinasi

Koordinasi dikaji menggunakan kriteria, menurut Handayani (dalam Aprilianto, 2016: 36-37) sebagai berikut:

a. Kesepakatan dan Komitmen

Sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pihak paguyuban

dan masyarakat, sesuai pendapat Handayani (dalam Aprilianto, 2016:36-37). Pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus Paguyuban Kampung Tematik Kuliner tertulis dalam Surat Keterangan (SK), yang diterbitkan pihak RW saat program mulai dilaksanakan. Telah terbentuk struktur organisasi yang jelas. Koordinasi antar Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan telah terdapat kesepakatan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak. Bappeda bertugas merencanakan, mengawal, dan mengevaluasi. Kecamatan sebagai pengawas dan ikut dalam proses pembangunan serta mengevaluasi. Kelurahan sebagai pendukung, penghubung dengan pemerintah, fasilitator, dan mengawal pelaksanaan program bersama masyarakat.

Pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dibutuhkan komitmen yang kuat antar *stakeholder*. komitmen dari pihak Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari masih adanya kepedulian terhadap perkembangan program, saling bekerja sama dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program. Komitmen LPMK, Ketua RW 02, dan pengurus paguyuban juga dikatakan sudah tinggi, karena adanya kepedulian untuk

selalu membantu serta mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan dan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Griffin (dalam Arumsari, 2017:12) yang menyatakan individu berkomitmen tinggi akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam suatu organisasi, sehingga akan memunculkan loyalitas atau kesetiaan dalam dirinya.

Pada sisi lain, komitmen pelaku usaha masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena penurunan minat pembeli yang menyebabkan sepi pengunjung. Penurunan minat pembeli menyebabkan antusias pelaku usaha menurun, sehingga pelaku usaha menjadi malas dan khawatir akan merugi. Penyebab lain yaitu adanya kesibukan yang lebih diprioritaskan, seperti banyaknya pesanan yang membuat pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan tersebut, karena dirasa lebih menguntungkan. Berdasarkan pendapat Griffin (dalam Arumsari, 2017:12) kurangnya komitmen menandakan pelaku usaha belum memosisikan dirinya sebagai anggota jangka panjang, yang akan terus berpartisipasi aktif dalam program.

b. Kompetensi

Kompetensi Bappeda, Kecamatan, Kelurahan, serta LPMK sudah tinggi, karena telah memiliki pengetahuan,

kemampuan, sikap, dan semangat kerja yang baik dalam proses koordinasi. Kompetensi yang tinggi dari pemerintah didukung oleh keahlian yang dimiliki, karena merupakan seorang ahli dalam bidang pembangunan. Pihak Ketua RW dan LPMK, sudah dapat dikatakan kompeten, karena memiliki pengetahuan, sikap, kemampuan, dan semangat kerja yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pelatihan atau sosialisasi yang diselenggarakan bagi para pelaku usaha.

Kompetensi dari pelaku usaha masih cenderung rendah, karena adanya pelaku usaha yang kurang memahami hasil koordinasi dengan paguyuban. Rendahnya kompetensi pelaku usaha disebabkan karena, minimnya kemampuan dan tenaga yang dimiliki dalam melaksanakan hasil koordinasi, akibat sumber daya manusia yang mayoritas sudah berumur. Hal tersebut menyebabkan program kurang berkembang. Semangat kerja pelaku usaha dalam pelaksanaan program juga menurun, akibat adanya kesibukan lain yang lebih diprioritaskan, serta antusias pembeli menurun akibat program yang kurang berkembang. Pengetahuan dan sikap yang baik dari pengurus paguyuban, menjadi kurang berarti apabila kemampuan dan semangat kerja pelaku usaha masih rendah. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Handayani (dalam

Aprilianto, 2016:36-37) bahwa individu dikatakan kompeten apabila memiliki tingkat pengetahuan, kemampuan, sikap, dan semangat yang baik.

c. Kesadaran

Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan telah memiliki kesadaran yang tinggi, karena telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta peranannya, untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program. Pihak Ketua RW 02 juga telah memiliki kesadaran tinggi, karena telah bertanggung jawab selama menjalankan tugas dan perannya sebagai perwakilan RW dan penanggung jawab program. Kesadaran masyarakat maupun pengurus paguyuban, dalam melaksanakan hasil koordinasi masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pengurus paguyuban yang kurang bertanggung jawab, dalam mengemban tugasnya. Dibuktikan dengan adanya *double job*, karena terdapat pengurus paguyuban yang lebih mementingkan kesibukan pribadi. Adanya *double job*, menyebabkan hasil kesepakatan mengenai pembangian tugas cenderung dihiraukan. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban kerja pengurus lain, seperti pernyataan Adyarezky (2018:24) bahwa setiap *stakeholder* tidak dapat bertindak tak sesuai dengan kesepakatan, karena hal

tersebut akan mengganggu kestabilan *stakeholder* lainnya.

Kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha juga cenderung rendah, disebabkan karena kurangnya tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan tugas dan perannya selama pelaksanaan. Adanya pelaku usaha yang terkadang tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan, membuktikan kesadaran yang dimiliki rendah. Rendahnya kesadaran pelaku usaha disebabkan karena, menurunnya antusias pelaku usaha untuk berjualan karena sepiunya pengunjung, kurangnya kepedulian yang dimiliki, serta sumber daya manusia yang mayoritas sudah berumur. Pelaku usaha merupakan subjek utama dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner, dimana seharusnya mereka selalu aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program, demi keberlanjutan program dan peningkatan perekonomian bersama.

d. Kontinuitas

Hasil penelitian menemukan belum adanya keberlanjutan koordinasi antar Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan, maupun Kelurahan dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, Bappeda dan Kecamatan telah menyerahkan pelaksanaan program sepenuhnya pada Kelurahan, beserta masyarakat. Koordinasi yang belum berkelanjutan, dikarenakan tidak adanya

pertemuan rutin selama pelaksanaan program. Koordinasi antar Kelurahan dengan Ketua RW 02 hanya dilakukan sesekali, pada saat pertemuan LPMK.

Koordinasi yang dilakukan antar pengurus dan pelaku usaha saat ini cenderung berkurang, sehingga keberlanjutan koordinasi menjadi kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena, rapat rutin paguyuban sudah jarang dilakukan, akibat sulitnya menyesuaikan waktu diantara kesibukan setiap pihak. Menyebabkan keberlanjutan koordinasi kurang maksimal. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Handyaningrat (dalam Aprilianto, 2016: 36-37) bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

e. Kesetaraan

Telah ada kesetaraan diantara *stakeholder* Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan dalam menjalankan perannya, namun masih ditemukan dominasi peran dari masyarakat. *Stakeholder* masyarakat merupakan pihak yang paling mendominasi pelaksanaan program. Realitanya, pemerintah yakni Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan program, karena adanya pendelegasian pelaksanaan program kepada masyarakat. Pemerintah diposisikan hanya sebagai

pendukung dalam pelaksanaan program. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memiliki peranan cukup besar dalam pelaksanaan, pengelolaan, hingga pengembangan program. Peranan masyarakat yang besar, mendorong adanya dominasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

Menurut pendapat dari beberapa informan penelitian bahwa, Ketua RW sekaligus Penanggung Jawab program memiliki peran yang cukup mendominasi. Munculnya dominasi tersebut disebabkan karena, perannya sebagai Ketua RW sekaligus penanggung jawab program, yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk mengatur segala hal dalam program. Hal tersebut menyebabkan peran *stakeholder* lainnya tidak begitu terlihat. Pengurus paguyuban dan pelaku usaha, hanya mengikuti hal-hal yang diperintahkan dari Ketua RW, sehingga memunculkan ketergantungan secara berlebihan.

Munculnya dominasi peran, menandakan masih ada ketidaksetaraan yang dapat menghambat tercapainya sinergitas *stakeholder*. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pendapat Parji (2017:10-11) bahwa antar individu dapat dikatakan setara apabila tidak ada individu yang paling berkuasa dan mendominasi. Perlu diingat bahwa seluruh *stakeholder* memiliki perannya masing-masing.

Seluruh *stakeholder* yang terlibat tidak disarankan untuk melakukan tindakan yang mendominasi, seharusnya lebih bersifat membantu secara wajar, supaya peran dari *stakeholder* lainnya tidak melemah.

B. Faktor Penghambat Sinergitas Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang.

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Rakamdani (2019:13) sumber daya manusia menjadi faktor penting dan mempengaruhi sinergitas *stakeholder*, dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas, dapat menghambat pelaksanaan dan perkembangan program, sehingga pelaksanaan program menjadi kurang efektif. Kualitas sumber daya manusia dari pihak masyarakat cenderung rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kompetensi, komitmen, keaktifan, tanggung jawab, dan semangat kerja pelaku usaha dalam menjalankan perannya. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia terbatas, akibat banyaknya pelaku usaha yang sudah tidak aktif. Rendahnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia, menyebabkan komunikasi dan koordinasi menjadi kurang maksimal, sehingga menghambat upaya bersinergi antar *stakeholder*.

2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran menjadi unsur penting dalam pelaksanaan dan pengembangan program, serta sinergi antar *stakeholder*. Menurut Rakamdani (2019:13) jumlah anggaran yang dimiliki akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, apabila anggaran yang diperlukan terbatas, maka akan menghambat jalannya pelaksanaan program. Anggaran pelaksanaan Kampung Tematik Kuliner hanya berasal dari kas paguyuban yang jumlahnya terbatas. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah maupun pihak lainnya, saat pelaksanaan program. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya sarana prasarana pengembangan dan perbaikan, dan sulitnya merealisasikan gagasan baru. Hal ini menyebabkan penurunan intensitas komunikasi dan koordinasi, sehingga menghambat sinergitas antar *stakeholder*.

3. Dominasi Peran Dalam Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* yang paling mendominasi pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner. Dominasi peran dalam masyarakat dilakukan oleh pihak Ketua RW, yang memiliki pengaruh kekuasaan dan peran sangat besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program. Hal tersebut menyebabkan melemahnya peran paguyuban dan pelaku usaha, serta

menghambat tercapainya sinergitas antar *stakeholder*. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pendapat Parji (2017:10-11) dimana untuk mencapai hubungan yang sinergis, dibutuhkan kesetaraan tanpa dominasi diantara seluruh pihak dalam menjalankan peranannya.

KESIMPULAN

Sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik Kuliner belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kurang aktifnya pelaku usaha dalam memberi *feedback*, dan koordinasi yang belum efektif. Komunikasi antar seluruh *stakeholder* telah memenuhi kriteria *numerical*, *channel*, *goal*, dan *relationship type*, tetapi perlu peningkatan pada kriteria keaktifan pemberian *feedback*, dimana banyak pelaku usaha yang pasif dalam berpendapat.

Koordinasi antar *stakeholder* kurang efektif, karena rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menjalankan hasil kesepakatan. Kurangnya kompetensi dan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya. Kurang maksimalnya keberlanjutan koordinasi antar seluruh *stakeholder*, ditandai dengan koordinasi yang tidak rutin dan jarang dilakukan. Adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat, dibuktikan dengan dominasi peran dari pihak Ketua RW, akibat besarnya

kekuasaan yang dimiliki. Hal tersebut membuktikan bahwa sinergitas *stakeholder* belum berjalan dengan baik.

SARAN

- a) Perlu dilakukan peningkatan keaktifan pelaku usaha dalam memberi *feedback*, dengan membentuk forum diskusi secara lebih terbuka, yang mendorong seluruh pelaku usaha aktif dalam diskusi.
- b) Perlu dilakukan penguatan komitmen pelaku usaha dan pengurus paguyuban, melalui pengembangan ikatan hubungan *interpersonal* secara lebih erat. Kelurahan, LPMK, RW, paguyuban, dan pelaku usaha perlu menyelenggarakan pertemuan secara rutin, untuk menjaga keberlanjutan koordinasi antar seluruh *stakeholder*.
- c) Pengurus paguyuban harus melakukan pengedukasian dan bimbingan lebih lanjut, secara menyeluruh dan rutin, untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Pihak paguyuban harus meningkatkan promosi melalui media sosial, untuk menarik perhatian pelaku usaha yang belum bergabung dalam program.
- d) Paguyuban dan pelaku usaha perlu mencari pendanaan lain, seperti bantuan swadaya masyarakat atau bantuan oprasional RT/RW.

e) Seharusnya Ketua RW tidak bertindak mendominasi, tetapi lebih memberi pengayoman dan membantu secara wajar. Memberi kesempatan paguyuban dan pelaku usaha, untuk terlibat dalam setiap aktivitas pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyarezky, Gilang. (2018). *Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.*
- Aprilianto, M. Rian. (2016). *Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.*
- Arumsari, Wiwid Agnis. (2017). *Efektivitas Pemicu Terhadap Komitmen Penggunaan Jamban Di Desa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Skripsi. Pekalongan: Universitas Pekalongan.*
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang.* Diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 10.45 WIB.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v4i2.179>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2021). *Kecamatan Candisari Dalam Angka Tahun 2021.* Diakses pada 08 Maret 2022 Pukul 09.45 WIB.
- Butar, H. B. (2020). Sinergitas Antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. *Skripsi.* Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Dian, S., Prajanti, et.al. (2018). *Potensi Pengembangan Pasar Tematik di Kota Semarang. I(2), 95–106.*
- Dwinugraha, Akbar Pandu. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *PUBLISA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik.* Vol 2(1), 1-7.
- Fibrianiingtyas, Alia. (2020). Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Kelestarian Hutan Kawasan UB *Forest.* *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA).* Vol 4(4), 973-984.
- Handoko, G. (2017). Sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penanganan Perompakan di Perairan Nipah dan Selat Singapura. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semester.* 3(2), 29-30.
- Junaid, I. (2019). Model Sinergi Unsur Pentahelix Pariwisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare Dan Kabupaten Bone. *Sosiohumaniora*, 21, 1-12.
- Kagungan, Dian, Bambang Utoyo, D. F. (2021). Innovative Government Pemerintah Daerah Otonom Baru: Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS) Kabupaten Pasawaran (Issue Anggota 2). 7-11.
- Kagungan, Dian, Devi Yulianti. (2019).

- The synergy among stakeholders to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdeveloped area.* *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.* Vol 32(1), 16-23.
- Katalog Kampung Tematik Kuliner. (2021). E-Katalog Paguyuban Kampung Tematik Kuliner Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. Diakses pada 24 November 2022 Pukul 15.40 WIB.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)* (3rd ed.). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Lustiadi, Yadi. (2016). Aplikasi Konsep *Reinventing Government, Good Government* dan *New Public Service* Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik.* Vol. 2(1), 59-62.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (1st ed.). Sulawesi: Unimal Press.
- Mukarom, Z. (2021). *Teori-teori komunikasi* (1st ed.). Bandung: Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.
- Najiyati, S. dan S. R. T. S. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), pp.113-124.
- Napitupulu, Firman Saputra, et.al. (2020). Peran *Stakeholder* Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *E-Journal Undip.* 5-6.
- Parji. (2017). Studi Tentang Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Kecamatan Rungkut Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu. 5(April), 1–13.
- Pramono, Joko, Wulan Kinasih. (2019). Sinergitas Antar *Stakeholder* Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri.* 3(1), 301-307.
- Rakamdani. (2019). Sinergitas Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 6, 1–16.
- Sari, F. M. (2020). *Sinergitas Stakeholder Dalam Implementasi Zona Parkir Unair.* Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen.* Bandung: Refika Aditama.
- Sopyan, Indra. (2011). Komunikasi Kelompok Guru dan Murid Dalam Penyampaian Program *Cooperative Learning* Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pangalengan (SMKN5). *Skripsi.* Bandung: Universitas Komputer Indonesia.